

**EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu
Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :
YOGI YOLANDA
07011381621097**

**KEBIJAKAN PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu
Kabupaten Ogan Ilir)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

YOGI YOLANDA
07011381621097

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2020

Pembimbing I

Drs. Joko Siswanto, M. Si
NIP. 195706051985031003



27/7/2020

Pembimbing II

Dra. Retno susilowati
NIP. 195905201985032003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Agustus 2020.

Indralaya, 13 Agustus 2020

Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M. Si
NIP. 195706051985031003



.....

Anggota

2. Dra. Retno Susilowati
NIP. 195905201985032003



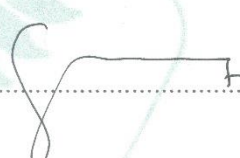
.....

3. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003



.....

4. Drs. Gatot Budiarto, M.Si
NIP. 195806091984031002



.....

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jangan menunggu, takkan pernah ada waktu yang tepat”

**Atas Ridho Allha SWT. Skripsi ini
Saya persembahkan untuk :**

- 1. Kedua Orang tua tercinta,
Bapak Teguh dan Ibu Mustika**
- 2. Ayukku Tety Pratiwi, Rina Ayu
Nirmala, Dita Erika Putri dan
Kakakku Idral Bhakti , Agung
Indra Putra dan Rizki Ramandah
serta Adikku Zahra Salsabila Putri.**
- 3. Saudaraku, Keluargaku,
Sahabatku, dan Temanku**
- 4. Teman-Teman Seperjuanganku
Administrasi Publik angkatan
2016**
- 5. Almamaterku**

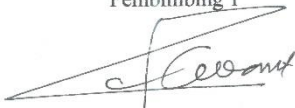
ABSTRAK

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Evaluasi Kinerja Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan dari William N Duun berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan, yakni *efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan*. Hasil penelitian ini menunjukan kinerja pemerintah desa Tanjung Atap Barat dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017-2019 belum maksimal karena dalam pengelolaan masih terfokus pada pembangunan fisik. Pada indikator ketepatan belum mempunyai kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa masih sangat kecil. Saran yang di rekomendasikan dalam penelitian ini, diharapkan peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) lebih berkomitmen dalam melakukan pengawasan pembangunan yang sesuai dengan prioritas potensi Desa Tanjung Atap Barat. Selain itu, aparat desa diharapkan mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan dari Pemerintah Kecamatan Tanjung Batu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Ilir agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Kemudian untuk menarik minat dan meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa diharapkan Pemerintah melakukan sosialisasi terbuka, misalnya dengan memasang spanduk tentang kemajuan dan potensi desa.

Kata kunci : Evaluasi, Kinerja, Kebijakan Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa

Pembimbing I




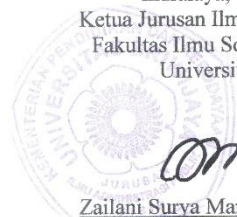
Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

Pembimbing II



Dra. Retno Susilowati
NIP. 195905201985032003

Indralaya, Agustus 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

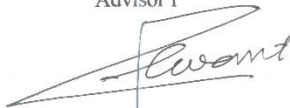
ABSTRACT

ABSTRACK

This research entitled "Evaluation of Village Government Policy Performance in Village Fund Allocation Management (Study in Tanjung Atap Barat Village, Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency)". This study purpose to evaluate the performance of the Tanjung Atap Barat Village Government in managing village fund allocations. This research uses descriptive qualitative method, data sources are primary data and secondary data, data collection techniques through interviews, observation and documentation. This research uses William N Duun's Policy Evaluation Theory based on six policy evaluation indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. The results of this study show that the performance of the village government of Tanjung Atap Barat in managing the allocation of village funds for 2017-2019 has not been optimal because the management is still focused on physical development. On the indicator of accuracy, there is no policy that can solve the economic problems of the community. In addition, community involvement in the management of village fund allocations is still very small. Suggestions recommended in this study, it is hoped that the role of the Village Consultative Body (BPD) is more committed to supervising development in accordance with the potential priorities of Tanjung Atap Barat Village. Beside that, village officials are expected to participate in training and education activities from the Tanjung Batu District Government and the Community and Village Empowerment Service (DPMD) of Ogan Ilir Regency so that they can carry out their duties and functions properly. Then to attract interest and increase community responsiveness to the management of village fund allocations, it is hoped that the Government will carry out open socialization, for example by placing banners about the progress and potential of the village.

Keyword : Evaluation, Performance, Village Government Policy, Village Allocation Funds

Advisor I



Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

Advisor II



Dra. Retno Susilowati
NIP. 195905201985032003

Indralaya, Agustus 2020
Head of the Departement of Public Administration
Faculty os Social Science and Political Science
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualan masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alahi Wassalam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman . Skripsi ini berjudul "Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak H.M.Teguh, SE & Ibu Hj. Mustika sebagai orang yang tidak pernah letih memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik serta menjadi penyemangat.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktunya serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Retno Susilowaty selaku Pembimbing II yang memberikan masukan dan saran yang membangun untuk penyusunan skripsi.
6. Seluruh keluarga Besar Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat
7. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi

Indralaya, 2020

Yogi Yolanda

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	XI
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitians	10
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan	11
2.3 Tipe- Tipe Evaluasi Kebijakan Publik.....	13
2.4 Kriteria evaluasi	14
2.5 Penelitian Terdahulu	18
2.6 Kerangka Pemikiran	20
METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Aspek Penelitian.....	24
3.3 Definisi Konsep.....	24
3.4 Fokus Penelitian	26
3.5 Unit Analisis Data	28
3.6 Informan Penelitian	29
3.7 Jenis dan Sumber Data.....	29

3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.9 Teknik Analisis Data	32
3.10 Teknik Pengabsahan Data.....	33
3.11 Sistematika Penulisan	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Kondisi Geografis.....	38
4.3 Agama Dan Pendidikan	40
4.4 Sosial Ekonomi Dan Adat Istiadat	43
4.5 Sarana Transportasi Dan Komunikasi	44
4.6 Pemerintahan.....	45
4.7 Hasil Dan Pembahasan	49
1. Kriteria Efektivitas	49
2. Kriteria Efisien.....	54
3. Kriteria Kecukupan	60
4. Kriteria Perataan.....	63
5. Kriteria Responsivitas	65
6. Kriteria Ketepatan	67
PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat	6
Tabel . 1.2 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 1.3 Fokus Penelitian	26
Tabel 1.4 Sarana Ibadah Desa Tanjung Atap Barat	41
Tabel 1.5 Data Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Atap Barat	41
Tabel 1.6 Sarana Pendidikan Di Desa Tanjung Atap Barat	42
Tabel 1.7 Mata Pencarian Masyarakat Desa Tanjung Atap Barat.....	43
Tabel 1.8 Aparatur Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat :.....	56
Tabel 1.9 Jadwal Piket Aparatur Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir.....	22
Gambar 1.2 Tugu Desa Tanjung Atap Barat	38
Gambar 1.3 Peta Wilayah Geografis Desa Tanjung Atap Barat	40
Gambar 1.4 Struktur Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat	47
Gambar 1.5 Kinerja Kebijakan Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat	51
Gambar 1.6 Laporan Mata Pencarian Dan Pendapatan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat	55
Gambar 1.6 Pedagang Kerajinan Alumanium.....	62
Gambar 1.7 Suasana Musyawarah Desa	66
Gambar 1.8 Pembagunan Jalan Setapak Di Desa Tanjung Atap Barat	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2015 tentang pergantian atas Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pemasukan serta belanja Negeri, yang pada pasal awal menarangkan Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang mengendalikan serta mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal-usul, serta/ ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negeri Republik Indonesia. Definisi tersebut pula tertuang dalam peraturan Menteri dalam Negara Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Dana Desa pada pasal ke satu. Pada poin kedua pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 22 Tahun 2015 tentang pergantian atas Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran serta pemasukan serta belanja Negeri dipaparkan definisi Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari anggaran pemasukan serta belanja wilayah Kabupaten/ Kota serta digunakan buat membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, penerapan pembangunan, pembinaan warga, pemberdayaan warga, serta definisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negara Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Dana Desa pada Pasal ke satu. Dengan demikian, Kepala Desa langsung dibawah pembinaan Bupati/Walikota. Kecamatan bukan lagi sebagai yang membawahi Desa-Desa tapi merupakan wilayah kerja Camat. Camat sendiri bukan Kepala wilayah dan penguasa tunggal wilayah nya, tapi hanya sebagai perangkat daerah Kabupaten. Jadi, Camat itu hanyalah staf daerah Kabupaten yang mengurus desa-desa.

Desa ialah struktur Pemerintah terkecil yang berfungsi strategis dalam proses pembangunan nasional, sebab bersentuhan secara langsung dengan warga. Desa Bagaikan Pemerintahan Terendah sudah diatur dalam. Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 pada bab 1 Pasal 1 yang diartikan desa merupakan adat ataupun yang diucap nama lain, berikutnya diucap desa, merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta/ ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia Undang- undang ini membagikan kewenangan Kepada Kepala Desa buat mengurus rumah tangganya diwujudkan dengan tingkatkan kesejahteraan warga Desa serta mutu hidup manusia, pembangunan fasilitas prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan area Pembangunan desa ialah bagian dari pembangunan nasional serta pembangunan desa ini mempunyai makna serta peranan yang berarti dalam menggapai tujuan nasional, sebab Desa berserta masyarakatnya ialah basis serta ekonomi, politik, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Oleh sebab itu dengan anggaran yang banyak sudah tersediakan butuh terdapatnya koordinasi dari Pemerintah baik Pusat ataupun Wilayah dan desa bagaikan tempat pelaksanaan pembangunan supaya segala program aktivitas tersebut silih mendukung serta terlaksana dengan baik cocok dengan rencana, sehingga bisa berdaya guna serta sukses guna.

Rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melaluh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina

perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat Desa, dan mewakili Desa nya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibanya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melaluhi Badan Perwakilan Desa (BPD), dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati, sekurang-kurang nya sekali dalam satu Tahun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang tata cara penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 Pada BAB IV Pasal 8 Alokasi Dana Desa/Kelurahan diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang memiliki peran penting dan senantiasa mendorong masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah desa agar pembangunan desa yang dilaksanakan dijadikan didapatkan secara demokrasi dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada BAB IV Pasal 10. Prioritas pemakaian alokasi Dana Desa/ Kelurahan buat program serta aktivitas dibidang Pemberdayaan Warga Desa, dialokasikan buat mendanai aktivitas yang bertujuan tingkatan kapasitas masyarakat ataupun warga desa dalam pengembangan wirausaha, kenaikan pemasukan, dan ekspansi skala ekonomi orang masyarakat ataupun kelompok warga serta desa, antara lain: :

- a. Kenaikan investasi ekonomi Desa melaluhi pengadaan, pengembangan ataupun dorongan alat- alat penciptaan, permodalan serta kenaikan kapasitas melaluhi pelatihan serta pemagangan.

- b. Sokongan aktivitas ekonomi baik yang dibesarkan oleh BUM Desa ataupun BUM Desa Bersama, ataupun oleh kelompok serta ataupun lembaga ekonomi warga Desa yang lain.
- c. Dorongan kenaikan kapasitas buat program serta aktivitas ketahanan pangan Desa.
- d. Pengorganisasian warga, fasilitasi serta pelatihan paralegal serta dorongan hukum warga Desa, tercantum pembuatan kader pemberdayaan warga desa(KPMD) serta pengembangan kapasitas Ruang Belajar Warga di Desa(Community Centre).
- e. Promosi serta bimbingan kesehatan warga dan gerakan hidup bersih serta sehat, tercantum kenaikan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes serta ketersediaan ataupun keberfungsian tenaga kedokteran/ swamedikasi di Desa.
- f. Kenaikan kapasitas kelompok warga buat tenaga keterbarukan serta pelestarian area hidup.
- g. Bidang aktivitas pemberdayaan ekonomi yang lain yang cocok dengan analisa kebutuhan Desa serta sudah diresmikan dalam musyawarah Desa.
- h. Kenaikan Kapasitas SDM aparatur Desa, lembaga kemasyarakatan, ataupun kelompok pemuda.

Kecamatan Tanjung Batu ialah salah satu dari 16 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan Tanjung Batu tercipta semenjak terjadinya Kabupaten Ogan Komering Ilir dekat 64 tahun yang kemudian, tetapi sebagian dari Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Tanjung Batu diresmikan kembali bersumber pada undang- undang No 37 tahun 2003 tentang pembuatan Kabupaten, Oku Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, serta Kabupaten Ogan Ilir, secara geografis Kecamatan Tanjung Batu mempunyai luas daerah 26.375 hektar ataupun 263.75 km² dibagi kedalam dataran rendah hingga ketinggian 10 m dari

permukaan laut, serta rawa-rawa 20 persen. batasan daerah Kecamatan Tanjung Batu merupakan:

- Sebelah utara : Kecamatan Indralaya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Payaraman, Lubuk Keliat dan Rantau Alai
- Sebelah Timur : Kecamatan Indralaya Selatan dan Tanjung Raja
- Sebelah Barat : Kabupaten Muara Enim

Kecamatan Tanjung Batu mempunyai 2 Kelurahan serta 19 Desa Kelurahan Tanjung Batu Tanjung Batu Timur, Tanjung Atap, Tanjung Atap Barat, Tanjung Batu Seberang, Tanjung Baru Petai, Tanjung Pinang 1, Tanjung Pinang II, Tanjung Laut, Limbang Jaya I, Limbang Jaya II, Burai, Pajar Bulan, Senuro Timur, Senuro Barat, Sentul, Seri Bandung, Seri Tanjung, Bangun Jaya, Tanjung Tambak, Tanjung Tambak Baru. Kepala desa diharuskan menggunakan sumber energi alam, menetapkan kebijakan melalui program, aktivitas, serta prioritas kebutuhan warga, supaya menggapai perekonomian desa yang baik serta kemakmuran warga desa dan melakukan tata Pemerintahan yang akuntabel, transparan, handal, efisien serta efektif, bersih, dan leluasa dari kolusi, korupsi serta nepotisme. Dalam perihal pengelolaan keuangan desa, bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negara No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang yakni kepala desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa harus mengantarkan laporan realisasi serta laporan pertanggung jawaban realisasi penerapan APBDES akhir tahun serta di informasikan kepada warga secara tertulis dengan media data yang gampang diakses oleh warga. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan bermutu.

Sesi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir telah cocok syarat yang berlaku dimana sudah dimulai dengan pembuatan regu pelaksana serta proses perencanaan dicoba dengan model

partisipan dalam aktivitas musyawarah. Regu pelaksana Dana Desa yang dimaksudkan dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku penanggung jawab operasional aktivitas(PJOK), sekretaris Desa Selaku Penanggung Jawab Administrasi Aktivitas(PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan(KUK) serta dibantu oleh lembaga Kemasyarakatan Desa. Pengelolaan ADD di Desa Tanjung Atap Barat.

Tabel. 1.1 Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat

**PENGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH DESA
TANJUNG ATAP BARAT TAHUN 2016-2018**

TAHUN	OPERASIONAL HONORIUM	FISIK	NON FISIK	JUMLAH
2016	55.900.000	24.000.000	4.500.000	84.400.000
	(66,2 %)	(28,4%)	(5,3%)	(100%)
2017	147.380.000	205.922.000	-	353.302.000
	(41,7%)	(58,2%)	(0%)	(100%)
2018	199.200.000	218.956.300	27.922.000	446.078.300
	(44,6%)	(49,8%)	(6,25%)	(100%)

2019	352.218.000	46.089.800	-	398.245.000
	(88,4%)	(11,6%)	(0%)	(100%)

Sumber : *Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat.*

Seperti yang dapat dilihat dari tabel, Pada Anggaran Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2017-2019 Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat lebih menfokuskan pembangunan bersifat fisik, dibandingkan Non Fisik salah satunya infrastruktur jalan dengan mengalokasikan dana di tahun 2016 (28,4%) 2017 mencapai (59 %) dan (49 %) ditahun 2018, untuk penggunaan anggaran Operasional honorium dan Pembangunan Non Fisik mengalami Penurunan.

Desa Tanjung Atap Barat merupakan Desa yang berada di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan masyarakat nya memiliki kreatifitas yang tinggi banyak kerajinan tangan yang lahir di Desa tersebut seperti kerajinan tikar purun, dan alumunium. Kerajinan ini sudah di pasarkan di kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Lahat, Muara enim, Batu Raja, Ogan Komerling Ulu, Oku Timur, Oku Selatan, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan Prabumulih, masyarakat memasarkan produk-produk kerajinan tikar Purun, dan Aluminium seperti Panci dan Kualii, dengan mengeluarkan dana pribadi modal perorangan belum adanya binaan dari Pemerintah Desa setempat seharusnya dengan harapan saya kedepan Pembangunan Ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Adanya Pengelolaan kerajinan tersebut adanya campur

tangan pemerintah sehingga adanya pemasukan bagi pemerintah Desa Tanjung Atap Barat itu sendiri yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan yang bersifat fisik saja.

ADD yang dialokasikan untuk desa dinilai masih belum cukup untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat karena dalam pengelolaannya belum tepat yang dilakukan Pemerintah Desa setiap tahunnya, Anggaran yang ternilai cukup besar yang mencapai kisaran uang sekitar 100.000.000 - 357.000.000 yang dialokasikan untuk masyarakat desa. Sedangkan dalam hal ini Desa Tanjung Atap Barat berusaha melakukan pengelolaannya dengan mengajak Musdes (Musyawarah Desa) tetapi temuan saya di lapangan Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 2 tahun terakhir hanya menfokuskan kepada Pembangunan fisik saja belum membangun desa secara umum seperti Infrastruktur jalan sehingga ini perlu dievaluasi kembali ketepatan sasaran dalam pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan menurut undang-undang pada pasal 67 ayat (2) undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan, bahwa Desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa, mengembangkan pemerdayaan masyarakat Desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa, dalam hal ini Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat belum tepat sasaran, untuk mengoptimalkan sepenuhnya dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk menfokuskan pembangunan Non Fisik seperti memperdayakan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. dengan potensi Desa yang merupakan daerah industri kreatif perlu adanya campur tangan pemerintah Desa untuk mengembangkan masyarakat dan industri itu sendiri dengan harapan saya kedepan Pemerintah Desa berperan aktif untuk menfokuskan kepada pembangunan masyarakatnya

karena selain membantu masyarakat kedepannya dapat menjadi masukan kas Desa kebijakan ini merupakan Pembangunan non fisik, tetapi juga tanpa harus meninggalkan Pembangunan fisik seperti Pembangunan infrastruktur jalan, siring, sarana olahraga maupun sarana kesehatan dll bila kebijakan ADD ini dikelola secara jujur serta baik apalagi cocok dengan kebutuhan warga desa tersebut. Hingga hasil Pembangunan bisa sangat berguna serta berakibat besar untuk kesejahteraan Warga buat mendukung bermacam aspek kehidupan warga. Bersumber pada penjelasan tersebut diatas hingga penulis tertarik buat mangulas lebih lanjut menimpa“**Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa “ (Studi Di Desa Tanjung Atap Barat kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan I**

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
“(Studi Di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
“(studi Di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)
2. Untuk mengevaluasi kendala-kendala menjalankan Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa “ (studi Di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

1.4 Manfaat Penelitians

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya terhadap masalah Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Kepala Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Kebutuhan Desa Dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elek Media Komputindo.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Moleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Penerbit Rosdakarya

Sugiyono. 2013. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:alfabeta.

Herlinda, Siti, Dkk 2010. *Metode Penelitian*. Palembang : Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.

Nazir, Mohammad, 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia.

Winarno, Budi 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses* Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo

Anderson, James E ; *Public Policy Making, Reinhart and Wiston, New York; 1970.*

Peraturan – Perundang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 15 tahun 2017 Tentang cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas penggunaan Alokasi dana Desa/Kelurahan dikabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Widodo, Joko, 2018. *Analisis kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*,. Malang: Media Nusa Creative